



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman dalam peraturan pemerintah, dalam hal belum adanya peraturan pemerintah, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri, persetujuan diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu dilakukan penyesuaian dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 136 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2014 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan di luar gaji yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dalam penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai.
18. Basic TPP adalah perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Indeks Kemahalan Konstruksi serta Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
19. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
20. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
21. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
22. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
23. Indeks Kesulitan Geografis adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di kabupaten.
24. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
25. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga terbaru yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap tingkat kemahalan konstruksi rata-rata Nasional.

26. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah jumlah indeks skoring variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
27. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
28. Aplikasi Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi yang selanjutnya disebut Aplikasi SADASBOR adalah alat bantu berbasis web untuk mengukur disiplin dan kinerja.
29. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

- (1) TPP merupakan bagian komitmen Pemerintah Daerah sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku bagi seluruh pegawai.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b. Pejabat Fungsional; dan
 - c. Pejabat Administrasi, terdiri atas:
 1. Pejabat Administrator;
 2. Pejabat Pengawas; dan
 3. Pejabat Pelaksana.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu atau sedang diberhentikan dari jabatan;
 - b. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah daerah;
 - c. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat;
 - d. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - e. Pegawai yang sedang mengikuti tugas belajar akademik; dan
 - f. Pegawai yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai;
- f. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
- g. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV KRITERIA DAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Kriteria

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. Beban Kerja;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Tempat Bertugas;
- d. Kondisi Kerja;
- e. Kelangkaan Profesi; dan/atau
- f. Pertimbangan Objektif Lainnya.

Paragraf 2

TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh pegawai pada Perangkat Daerah.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Paragraf 3

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Paragraf 4
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran basic TPP apabila indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).

Paragraf 5
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:
 - a. berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja pada perangkat daerah diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas pada:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan kebijakan umum;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Paragraf 6
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:

- a. memiliki keterampilan khusus;
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
 - c. merupakan jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari besaran basic TPP.

Paragraf 7

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada pegawai sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Bagian Kedua

Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Kriteria

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi pada setiap Perangkat Daerah diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Pegawai dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada:
- a. pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya paling rendah 10% (sepuluh per seratus) atau sesuai kemampuan keuangan daerah dari TPP yang diterima;
 - b. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat (kelas 7) namun tidak ada pejabat pelaksananya paling rendah 10% (sepuluh per seratus) atau sesuai kemampuan keuangan daerah dari TPP pelaksana dibawahnya; dan
 - c. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya paling rendah 10% (sepuluh per seratus) atau sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu
Basic TPP

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) TPP diberikan kepada pegawai setiap bulan berdasarkan perhitungan basic TPP sesuai dengan kelas jabatan dengan kriteria yang ditentukan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter yang meliputi:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran basic TPP diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut:

$\text{Basic TPP} = \frac{\text{(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)}}{\text{x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)}}$

Paragraf 2
Kelas Jabatan

Pasal 14

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang divalidasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan, sebagai berikut:
 - a. faktor jabatan struktural; dan
 - b. faktor jabatan pelaksana dan fungsional.
- (2) Faktor jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. hubungan personal;
 - e. kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain.
- (3) Faktor jabatan pelaksana dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman;
 - d. kompleksitas;
 - e. ruang lingkup dan dampak;
 - f. hubungan personal;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan fisik; dan
 - i. lingkungan pekerjaan.

Paragraf 3
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Pasal 15

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan menghitung pendapatan daerah dikurangi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (2) Kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Paragraf 4
Indeks Kemahalan Konstruksi

Pasal 16

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c ditentukan dengan membandingkan Indeks Kemahalan Konstruksi daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi kantor Badan Pemeriksa Keuangan Pusat berada.
- (2) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis daerah dan digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah.

Paragraf 5
Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, ditentukan berdasarkan akumulasi skor indeks variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Opini Laporan Keuangan, bobot 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bobot 25% (dua puluh lima per seratus);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah, bobot 10% (sepuluh per seratus);
 - d. Indeks Inovasi Daerah, bobot 3% (tiga per seratus);
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, bobot 18% (delapan belas per seratus);
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas, bobot 2% (dua per seratus); dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, bobot 2% (dua per seratus).
- (3) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia, bobot 6% (enam per seratus); dan
 - b. Indeks Gini Ratio, bobot 4% (empat per seratus).

Bagian Kedua
Perhitungan Akhir dan Besaran TPP

Pasal 18

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara basic TPP dengan masing-masing kriteria TPP yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran TPP Pegawai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENILAIAN TPP

Pasal 19

- (1) Penilaian TPP terdiri atas capaian disiplin dan kinerja pegawai.
- (2) Capaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 30% (tiga puluh per seratus) dilakukan berdasarkan:
 - a. Rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja; dan
 - b. Rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat pulang kerja.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 70% (tujuh puluh per seratus) dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas harian; dan
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas harian pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Aplikasi SADASBOR.
- (5) Penilaian melalui Aplikasi SADASBOR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan dalam kondisi:
 - a. adanya perubahan susunan organisasi Perangkat Daerah;
 - b. adanya rotasi, mutasi dan promosi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. *error system* dan/atau kerusakan *hardware*.

BAB VII
PENGURANGAN TPP

Pasal 20

- (1) Pengurangan TPP dilakukan apabila:
 - a. Pengurangan komponen disiplin;
 - b. Pengurangan komponen kinerja; dan
 - c. Pengurangan komponen disiplin dan kinerja.
- (2) Pengurangan komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan tidak mengikuti apel, dikenakan pengurangan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- b. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya, dikenakan pengurangan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55 %

- (3) Pengurangan komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- Pegawai yang tidak membuat laporan pelaksanaan tugas harian, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak membuat laporan pelaksanaan tugas harian;
 - Pejabat Penilai yang tidak memberikan persetujuan atau penolakan atas laporan pelaksanaan tugas harian pegawai yang dipimpinnya, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak memberikan review;
 - Pegawai yang telah membuat laporan pelaksanaan tugas harian, tetapi tidak di reviu oleh Pejabat Penilai dianggap telah membuat laporan pelaksanaan tugas harian.
- (4) Pengurangan komponen disiplin dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
- Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - Pegawai yang nilai kinerja bulanan dengan predikat butuh perbaikan, cukup, kurang dan sangat kurang dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima per seratus);
 - Pegawai yang menjalani cuti tahunan atau cuti karena alasan penting melebihi 12 (dua belas) hari kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus) per hari tidak masuk kerja;
 - Pegawai yang menjalani cuti besar atau cuti melahirkan, hanya dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per hari tidak masuk kerja;
 - Pegawai yang menjalani cuti sakit melebihi 3 (tiga) hari kerja dalam sebulan, hanya dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus) per hari tidak masuk kerja;
 - Pegawai yang menjalani cuti sakit selama sebulan penuh dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh per seratus) tiap bulan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - Pegawai yang sedang menerima hukuman disiplin.

Pasal 21

Pengurangan TPP kepada pegawai yang sedang menerima hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf h, dikenakan pengurangan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari TPP yang diterima selama 1 (satu) bulan;
 2. teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas per seratus) dari TPP yang diterima selama 1 (satu) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari TPP yang diterima selama 1 (satu) bulan.
- b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari TPP yang diterima selama 2 (dua) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari TPP yang diterima selama 2 (dua) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari TPP yang diterima selama 2 (dua) bulan.
- c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari TPP yang diterima selama 3 (tiga) bulan;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dikenakan pengurangan sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari TPP yang diterima selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. pembebasan dari jabatan, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari TPP yang diterima selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

Pengurangan TPP berdasarkan komponen disiplin, komponen kinerja, dan komponen disiplin dan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan/atau jumlah berdasarkan akumulasi semua komponen pengurangan dan hukuman disiplin, paling tinggi sebesar 100% (seratus per seratus) untuk setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 23

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil:

- a. apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya lebih ringan, maka TPP yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- b. apabila putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka TPP yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dapat dibayarkan kembali.

BAB VIII
MEKANISME DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pembayaran

Pasal 24

- (1) TPP dibayarkan secara kolektif pada setiap Perangkat Daerah setelah dilaksanakan penilaian terhadap seluruh Pegawai yang bersumber dari Aplikasi SADASBOR atau secara manual.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya atas hasil pencapaian kinerja bulan sebelumnya.
- (3) Pembayaran TPP bulan Desember paling lambat tanggal 20 Desember sebagai hasil pencapaian kinerja yang tercatat pada bulan tersebut.

Pasal 25

- (1) Sebagai dasar pembayaran TPP, Kepala Perangkat Daerah melakukan:
 - a. pengajuan rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. rekonsiliasi barang milik daerah.
- (2) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengelola kepegawaian setiap Perangkat Daerah mencetak rekapitulasi pembayaran TPP setelah dilakukan penilaian yang bersumber dari Aplikasi SADASBOR;
 - b. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai dasar pengajuan rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menerbitkan rekomendasi berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Format rekapitulasi pembayaran TPP, format rekomendasi dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rekapitulasi pembayaran TPP dilakukan secara manual apabila penilaian tidak dilakukan melalui SADASBOR dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (7) Pencetakan rekapitulasi secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan menggunakan format rekapitulasi manual sesuai dengan Aplikasi SADASBOR.

Pasal 26

Berdasarkan rekomendasi dan rekonsiliasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Bendahara Pengeluaran pada setiap Perangkat Daerah menerbitkan SPM-LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penundaan Pembayaran

Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP ditunda dalam hal:
 - a. Pegawai ditahan pihak yang wajib untuk menjalani proses hukum dan/atau diberhentikan sementara sampai dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. Pegawai yang wajib membuat LHKPN belum/tidak melaporkan LHKPN pada waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Pegawai menguasai atau memanfaatkan barang milik Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan
 - d. Pegawai yang belum menindaklanjuti penyelesaian kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pegawai yang ditahan dan/atau dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka TPP dibayarkan kembali sejak yang bersangkutan ditahan dan/atau diberhentikan sementara dengan mengesampingkan kinerja setiap bulan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam daftar usulan penerima TPP.

BAB IX
PENGANGGARAN

Pasal 28

Alokasi anggaran TPP untuk setiap Perangkat Daerah dianggarkan dalam kelompok Belanja Operasi Jenis Belanja Pegawai Objek Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kode rekening belanja yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan terakhir.
- (2) TPP tidak dibayarkan kepada Calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Harian jabatan lain, menerima TPP dari jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.

- (5) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas, berada satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap, hanya menerima TPP dari jabatan yang tertinggi.
- (6) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Harian, berada satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara, menerima TPP dari jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (7) Pejabat yang berhalangan sementara dan tugas hariannya dilaksanakan oleh Pelaksana Harian yang pelaksanaan tugasnya melebihi 1 (satu) bulan, maka berhak menerima TPP setinggi-tingginya 80% (delapan puluh per seratus) dari besaran TPP jabatannya.
- (8) TPP tambahan bagi pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan lain dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
- (9) Besaran TPP tambahan bagi pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan lain dihitung proporsional berdasarkan banyak hari kerja menjabat dalam 1 (satu) bulan.
- (10) Pegawai yang mutasi dan/atau promosi sebelum dan/atau tanggal 15, maka besaran TPP yang diterima adalah besaran TPP di tempat yang baru, sedangkan pegawai yang mutasi dan/atau promosi setelah tanggal 15, maka besaran TPP yang diterima adalah besaran TPP di tempat yang lama.
- (11) Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan, TPP dibayarkan penuh pada bulan tersebut kepada ahli waris yang sah.
- (12) Pegawai yang terlambat masuk kerja dengan izin atasan langsungnya sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dapat mengganti waktu keterlambatan sesuai waktu keterlambatan setelah jam pulang kerja pada hari yang bersangkutan.
- (13) Pegawai yang diberikan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, berhak mendapatkan TPP dan mendapatkan hak-hak lainnya yang sah kecuali hak Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa.
- (14) Pegawai pindahan dari daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan TPP.
- (15) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat diberikan TPP apabila sudah dianggarkan dan adanya ketersediaan anggaran.
- (16) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS pada tahun anggaran berjalan diberikan TPP apabila sudah dianggarkan dan adanya ketersediaan anggaran.
- (17) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS pada tahun anggaran berjalan sebagaimana ayat (16) dapat menerima TPP terhitung mulai pada bulan teranggarkan dalam APBD.
- (18) Hak cuti tahunan menjadi berkurang apabila pegawai tidak masuk kerja dengan alasan izin yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak dikenakan pengurangan TPP sepanjang izin tidak melebihi 12 (dua belas) hari kerja.
- (19) Tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya diberikan kepada Pegawai sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 136 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 5 Januari 2024

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 5 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,**

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 4 TAHUN 2024
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Perbulan
	Sekretariat Daerah		
1	Sekretaris Daerah	15	48,013,865
2	Staf Ahli Bupati	13	27,287,196
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	32,547,361
4	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12	16,859,053
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,675,865
6	Analisis Pemerintahan Daerah	7	3,591,974
7	Pengelola Batas Wilayah, Rupa bumi dan Paten	6	3,089,580
8	Pengelola Perangkat Kecamatan	6	3,089,580
9	Pengadministrasi Umum	5	3,071,679
10	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	9	7,675,399
11	Analisis Kerja Sama	7	3,591,974
12	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7	3,591,974
13	Penyusun Laporan Kebijakan	7	3,346,235
14	Pengolah Data	6	3,089,580
15	Kepala Sub Bagian Pertanahan	9	7,675,399
16	Analisis Pertanahan	7	3,591,974
17	Pengelola Data Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	6	3,089,580
18	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	16,859,053
19	Kepala Sub Bagian Bina Mental Spritual	9	7,675,399
20	Analisis Lembaga Keagamaan	7	3,591,974
21	Pemandu Kerukunan Umat Beragama	5	3,071,679
22	Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan	7	3,346,235
23	Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan	6	3,089,580
24	Penyusun Data Pendidikan Agama dan Keagamaan	7	3,346,235
25	Pengelola Bantuan Keagamaan	6	3,089,580
26	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,675,865
27	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan	6	3,089,580
28	Pengelola Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	6	3,089,580
29	Analisis Masyarakat	7	3,591,974
30	Pengolah Data	6	3,089,580

31	Kepala Bagian Hukum	12	16,859,053
32	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	7,673,185
33	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	3,591,974
34	Pengadministrasi Hukum	5	3,071,679
35	Penyuluh Hukum Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	7,673,185
36	Analisis Permasalahan Hukum	7	3,591,974
37	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7	3,346,235
38	Analisis Hukum Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,675,865
39	Analisis Produk Hukum	7	3,591,974
40	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6	3,089,580
41	Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum	6	3,089,580
42	Pengadministrasi Umum	5	3,071,679
43	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	32,547,361
44	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	12	16,859,053
45	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,675,865
46	Analisis Pembinaan BLU	7	3,591,974
47	Pengolah Data Informasi BLU	6	3,089,580
48	Penelaah Perkembangan BUMD	7	3,450,805
49	Analisis Perekonomian	7	3,591,974
50	Analisis Ekonomi Kreatif	7	3,591,974
51	Analisis Ekonomi Makro	7	3,591,974
52	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	3,450,805
53	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	6	3,089,580
54	Analisis Pembangunan	7	3,591,974
55	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	3,591,974
56	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	7	3,591,974
57	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	3,089,580
58	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	12	16,859,053
59	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,675,865
60	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	3,581,517
61	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	3,450,805
62	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	3,089,580
63	Pranata Barang dan Jasa	6	3,089,580
64	Analisis Sistem Informasi	7	3,591,974
65	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	3,089,580
66	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	3,071,679

67	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	3,591,974
68	Analisis Advokasi Hukum	7	3,591,974
69	Pengelola Data	6	3,089,580
70	Asisten Administrasi Umum	14	32,547,361
71	Kepala Bagian Umum	12	16,859,053
72	Kepala Sub Bagian Kearsipan	9	7,675,399
73	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7	3,591,974
74	Penyuluh Kearsipan	6	3,089,580
75	Pranata Kearsipan	6	3,089,580
76	Pranata Reproduksi Arsip	6	3,089,580
77	Pengelola Sistem dan Jaringan (JIKN)	6	3,089,580
78	Kepala Sub Bagian Perpustakaan	9	7,675,399
79	Penyuluh perpustakaan	6	3,089,580
80	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	7	3,346,235
81	Pengelola Bahan Pustaka	6	3,089,580
82	Pengelola Pustaka Elektronik	6	3,089,580
83	Pengelola Perpustakaan	6	3,089,580
84	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9	7,675,399
85	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	3,346,235
86	Pengelola Barang Milik Negara	6	4,089,149
87	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	3,089,580
88	Pemelihara Peralatan	5	3,071,679
89	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas (Pendopo)	6	5,047,828
90	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	3,089,580
91	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	3,089,580
92	Pengadministrasi Umum	5	3,071,679
93	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	3,071,679
94	Pengelola Bangunan Gedung	6	3,089,580
95	Pengolah Makanan	6	3,089,580
96	Pengolah Makanan (Pendopo)	6	4,385,386
97	Pranata Jamuan (Pendopo)	6	4,339,951
98	Kepala Bagian Organisasi	12	16,859,053
99	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,675,865
100	Analisis Kelembagaan	7	3,607,660
101	Analisis Jabatan	7	3,607,660
102	Pengolah Data	6	3,089,580
103	Analisis Tata Laksana	7	3,607,660
104	Pengolah Data	6	3,089,580

105	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	3,607,660
106	Pengolah Data	6	3,089,580
107	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	16,859,053
108	Kepala Sub Bagian Keprotokolan	9	7,820,747
109	Pranata Acara	5	3,239,714
110	Penata Acara	7	3,503,090
111	Petugas Protokol	6	3,271,320
112	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	9	7,820,747
113	Sekretaris (Bupati dan Wakil Bupati)	5	4,850,099
114	Ajudan (Bupati/Wakil Bupati)	6	6,179,159
115	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas (Bupati dan Wakil Bupati)	6	3,271,320
116	Pengadministrasian Keuangan (Bupati dan Wakil Bupati)	5	3,486,009
117	Penyusun Naskah (Bupati dan Wakil Bupati)	7	3,503,090
118	Pengadministrasian Umum (Bupati dan Wakil Bupati)	5	3,486,009
119	Pengemudi VIP (Bupati dan Wakil Bupati)	4	4,626,219
120	Kepala Sub Bagian Dokumentasi	9	7,820,747
121	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	3,503,090
122	Pengelola Dokumentasi	6	3,271,320
123	Pengelola Layanan Kehumasan	6	3,271,320
124	Kepala Bagian Tata Usaha	12	16,859,053
125	Perencana Ahli Muda (Penyediaan Jabatan)	10	7,675,865
126	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	3,591,974
127	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,089,580
128	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	7,675,399
129	Penyusun Laporan Keuangan	7	3,346,235
130	Bendahara	7	4,705,643
131	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	3,089,580
132	Pengelola Gaji	6	3,089,580
133	Pengadministrasian Keuangan	5	3,071,679
134	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9	7,675,399
135	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	3,591,974
136	Pengelola Kepegawaian	6	3,089,580
137	Pengelola Surat	6	3,089,580
138	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	3,346,235
139	Pengelola Perpustakaan	6	3,089,580
140	Sekretaris (Sekretaris Daerah)	5	4,584,859
141	Ajudan (Sekretaris Daerah)	6	5,370,416
142	Pengemudi (Sekretaris Daerah)	3	4,063,657

143	Pengadministrasi Umum	5	3,071,679
144	Analisis hukum	8	3,577,382
145	Arsiparis (Ahli Muda)	9	3,836,593
146	Arsiparis (Ahli Pertama)	8	3,828,137
147	Arsiparis Terampil	6	2,018,011
148	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	11	4,377,382
149	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	9	4,277,382
150	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	8	4,577,382
151	Penyuluh Hukum	8	3,577,382
152	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	8	3,577,382
153	Perencana	8	3,577,382
154	Pranata Hubungan Masyarakat	8	3,577,382
155	Pranata Komputer	6	3,577,382
156	Pustakawan Ahli Muda	9	3,836,593
157	Pustakawan Ahli Pertama	8	2,875,283
158	Pustakawan Ahli Terampil	6	2,202,995

	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
1	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14	24,653,817
2	Kepala Bagian Umum	12	14,162,670
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9	5,513,060
4	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,270,784
5	Pengelola Kepegawaian	6	2,040,264
6	Pengadministrasian Umum	5	1,900,264
7	Pengelola Perjalanan Dinas	6	2,040,264
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	5,513,060
9	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	2,040,264
10	Pengemudi	3	1,129,710
11	Pengelola Kendaraan	6	2,040,264
12	Pranata Jamuan	5	1,940,264
13	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	5	2,040,264
14	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	2,040,264
15	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	7	2,040,264
16	Pengelola Barang Milik Negara	6	3,116,420
17	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	14,162,670
18	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	5,513,060
19	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,270,784
20	Pengelola Bahan Perencanaan	6	2,040,264
21	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	5,513,060
22	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	2,337,250
23	Bendahara	7	3,604,400
24	Kepala Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat	12	14,162,670
25	Perisalah Legislatif Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	5,513,060
26	Penyusun Risalah	7	1,975,750
27	Pengadministrasian Risalah	5	1,975,750
28	Pengelola Persidangan	6	1,975,750
29	Pengadministrasian Rapat	5	1,975,750
30	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	8	5,513,060
31	Petugas Protokol	6	1,975,750
32	Ajudan	6	1,975,750
33	Sekretaris	5	2,270,784
34	Pengelola Pengaduan Publik	6	1,975,750
35	Pengelola Layanan Kehumasan	6	1,975,750
36	Kepala Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum	12	14,162,670

37	Perisalah Legislatif Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	5,513,060
38	Pengelola Bahan Administrasi Anggota	6	1,975,750
39	Analisis Produk Hukum	7	2,270,784
40	Analisis Hukum Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	5,513,060
41	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6	1,975,750
42	Pengelola Perpustakaan	6	1,975,750
43	Arsiparis	6	1,975,750
44	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	8	2,270,784
45	Perencana	8	2,270,784
46	Pranata Komputer	6	1,975,750

	INSPEKTORAT		
1	Inspektur	14	34,968,374
2	Sekretaris Inspektorat	12	19,503,884
3	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	8,816,508
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	5,604,944
5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	5,103,758
6	Pengelola Peraturan Perundang-Undangan	6	5,162,324
7	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	5,103,758
8	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	6	5,162,324
9	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	5,103,758
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	8,816,785
11	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	5,607,558
12	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	5,162,324
13	Pengelola Kepegawaian	6	5,162,324
14	Pengadministrasi Umum	5	5,103,110
15	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	5,162,195
16	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	5,103,758
17	Pengelola Barang Milik Negara	6	6,187,428
18	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	8,816,785
19	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	5,088,719
20	Bendahara	7	6,253,283
21	Inspektur Pembantu I	11	18,444,278
22	Inspektur Pembantu II	11	18,444,278
23	Inspektur Pembantu III	11	18,444,278
24	Inspektur Pembantu Khusus	11	18,444,278
25	Auditor Madya	11	10,665,326
26	Auditor Muda	9	8,816,785
27	Auditor Pertama	8	7,910,672
28	Auditor Penyelia	8	-
29	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	-
30	Auditor Pelaksana	6	-
31	P2UPD Ahli Madya	11	10,665,326
32	P2UPD Ahli Muda	9	8,816,785
33	P2UPD Ahli Pertama	8	7,910,672
34	Arsiparis	6	5,588,504
35	Perancang Peraturan Perundang-undangan	6	5,588,504
36	Calon Auditor	8	5,606,259
37	Calon P2UPD	8	5,606,259

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup			
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	14	23,653,817
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	12	14,852,556
3	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
4	Arsiparis Terampil	6	2,032,418
5	Pranata Komputer	6	1,283,931
6	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,032,418
7	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,793,830
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,750,122
9	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,032,418
10	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,793,830
11	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,793,830
12	Pengelola Kepegawaian	6	1,793,830
13	Pengelola Barang Milik Negara	6	2,868,701
14	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,793,830
15	Pengadministrasi Umum	5	1,793,830
16	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3,750,122
17	Bendahara	7	2,868,701
18	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,793,830
19	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan	11	7,410,539
20	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
21	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	2,032,418
22	Teknik Jalan dan Jembatan Terampil	6	2,032,418
23	Analisis Jalan Jembatan	7	2,032,418
24	Penata Gambar	7	1,793,830
25	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7	1,793,830
26	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	6	1,793,830
27	Pengelola Kelengkapan Jalan	6	1,793,830
28	Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	6	1,793,830
29	Pengelola Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan	6	1,793,830
30	Kepala Bidang Sumber Daya Air	11	7,410,539
31	Teknik Pengairan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
32	Teknik Pengairan Ahli Pertama	8	2,032,418
33	Analisis Sumber Daya Air	7	2,032,418
34	Penata Gambar	7	1,793,830

35	Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	6	1,793,830
36	Pengelola Sumber Daya Air	6	1,793,830
37	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	5	1,793,830
38	Pemeriksa Irigasi	7	1,793,830
39	Pengawas Irigasi	7	1,793,830
40	Pengelola Irigasi	6	1,793,830
41	Kepala Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi	11	7,410,539
42	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
43	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	7	2,032,418
44	Penata Gambar	7	1,793,830
45	Pengelola Jasa Konstruksi	6	1,793,830
46	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
47	Pengelola Tata Bangunan Pemerintah	6	1,793,830
48	Pengelola Tata Bangunan Umum	6	1,793,830
49	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	1,793,830
50	Pengelola IMB Gedung atau Bangunan	6	1,793,830
51	Pengadministrasi IMB Gedung atau Bangunan	5	1,793,830
52	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	11	7,410,539
53	Penata Ruang Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
54	Penata Ruang Ahli Pertama	8	2,032,418
55	Analisis Tata Ruang	7	2,032,418
56	Analisis Peta Wilayah	7	2,032,418
57	Pengelola Tata Ruang	6	1,793,830
58	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	2,032,418
59	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6	1,793,830
60	Pengawas Tata Ruang	7	1,793,830
61	Pengelola Tata Ruang	6	1,793,830
62	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	11	7,410,539
63	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
64	Analisis Perumahan	7	2,032,418
65	Penata Gambar	7	1,793,830
66	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	1,793,830
67	Analisis Penataan Kawasan	7	2,032,418
68	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7	1,793,830
69	Pengawas Fisik Pemukiman	7	1,793,830
70	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	1,793,830
71	Juru Survei Permukiman Perumahan	5	1,793,830

72	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
73	Pengawas Jaringan Utilitas	7	2,064,274
74	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	7	2,064,274
75	Kepala Bidang Lingkungan Hidup	11	7,410,539
76	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
77	Analisis Lingkungan Hidup	7	2,032,418
78	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	7	1,793,830
79	Penelaah Dampak Lingkungan	7	1,793,830
80	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	6	1,793,830
81	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
82	Penelaah Dampak Lingkungan	7	1,793,830
83	Fasilitator Kemitraan	7	1,793,830
84	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	6	1,793,830
85	Penelaah Proses di bidang Lingkungan	7	1,793,830
86	Pengelola Penataan Sampah	6	1,793,830
87	Pengelola Limbah	6	1,793,830
88	Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan	8	3,700,344
89	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Perbengkelan	8	3,504,653
90	Pengelola Kepegawaian	6	1,503,898
91	Pengadministrasi Umum	5	1,485,343
92	Pengadministrasi Keuangan	5	1,579,542
93	Pengelola Bengkel	6	1,480,131
94	Teknisi Peralatan dan Mesin	5	1,480,131
95	Operator Alat Berat	5	1,480,131
96	Pengemudi	3	994,118
97	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	9	3,700,349
98	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	8	3,504,653
99	Pengelola Kepegawaian	6	1,503,898
100	Pengadministrasi Umum	5	1,485,343
101	Pengadministrasi Keuangan	5	1,579,542
102	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal, dan Beton	7	1,480,131
103	Pengelola Laboratorium	6	1,480,131
104	Kepala UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Ciawi	8	3,700,344
105	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Ciawi	8	3,504,653
106	Pengelola Kepegawaian	6	1,503,898
107	Pengadministrasi Keuangan	5	1,579,542

108	Pengadministrasi Umum	5	1,485,343
109	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	1,480,131
110	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	1,480,131
111	Kepala UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Cikatomas	8	3,700,344
112	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Cikatomas	8	3,504,653
113	Pengelola Kepegawaian	6	1,503,898
114	Pengadministrasi Umum	5	1,485,343
115	Pengadministrasi Keuangan	5	1,579,542
116	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	1,480,131
117	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	1,480,131
118	Pemelihara Jalan	5	1,480,131
119	Teknisi Air	5	1,480,131
120	Kepala UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sukaratu	8	3,700,344
121	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sukaratu	8	3,504,653
122	Pengelola Kepegawaian	6	1,503,898
123	Pengadministrasi Umum	5	1,485,343
124	Pengadministrasi Keuangan	5	1,579,542
125	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	1,480,131
126	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	1,480,131
127	Pemelihara Jalan	5	1,480,131
128	Teknisi Air	5	1,480,131
129	Kepala UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sukaraja	8	3,700,344
130	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sukaraja	8	3,504,653
131	Pengelola Kepegawaian	6	1,503,898
132	Pengadministrasi Umum	5	1,485,343
133	Pengadministrasi Keuangan	5	1,579,542
134	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	1,480,131
135	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	1,480,131
136	Pemelihara Jalan	5	1,480,131
137	Teknisi Air	5	1,480,131
138	Kepala UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Karangnunggal	8	3,700,344
139	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Karangnunggal	8	3,504,653
140	Pengelola Kepegawaian	6	1,503,898
141	Pengadministrasi Umum	5	1,485,343
142	Pengadministrasi Keuangan	5	1,579,542
143	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	1,480,131
144	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	1,480,131

145	Pemelihara Jalan	5	1,480,131
146	Teknisi Air	5	1,480,131
147	Kepala UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Manonjaya	8	3,700,344
148	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Manonjaya	8	3,504,653
149	Pengelola Kepegawaian	6	1,503,898
150	Pengadministrasi Umum	5	1,485,343
151	Pengadministrasi Keuangan	5	1,579,542
152	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	1,480,131
153	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	1,480,131
154	Pemelihara Jalan	5	1,480,131
155	Teknisi Air	5	1,480,131
156	Kepala UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Singaparna	8	3,700,344
157	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Singaparna	8	3,504,653
158	Pengelola Kepegawaian	6	1,503,898
159	Pengadministrasi Umum	5	1,485,343
160	Pengadministrasi Keuangan	5	1,579,542
161	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	1,480,131
162	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	1,480,131
163	Pemelihara Jalan	5	1,480,131
164	Teknisi Air	5	1,480,131
165	Kepala UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Taraju	8	3,700,344
166	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Taraju	8	3,504,653
167	Pengelola Kepegawaian	6	1,503,898
168	Pengadministrasi Umum	5	1,485,343
169	Pengadministrasi Keuangan	5	1,579,542
170	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	1,480,131
171	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	1,480,131
172	Pemelihara Jalan	5	1,480,131
173	Teknisi Air	5	1,480,131
174	Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelola Sampah	9	3,700,349
175	Kepala Subag Tata Usaha UPTD Kebersihan dan Pengelola Sampah	9	3,504,580
176	Pengelola Kepegawaian	6	1,503,898
177	Pengadministrasi Umum	5	1,485,343
178	Pengadministrasi Keuangan	5	1,579,542
179	Pengemudi	3	994,118
180	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	6	1,480,131
181	Pengelola Penataan Sampah	6	1,793,830
182	Juru Pungut Retribusi	3	752,601
183	Pramu Kebersihan	1	670,238

	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	23,653,817
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	14,569,737
3	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,122
4	Arsiparis Ahli Pertama	8	2,018,011
5	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,018,011
6	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,762,902
7	Pengelola Database Pendidikan	6	1,762,902
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,750,122
9	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,018,011
10	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,762,902
11	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
12	Pengadministrasi Umum	5	1,762,902
13	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,762,902
14	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,762,902
15	Pengelola Barang Milik Negara	6	3,336,956
16	Pramu Kebersihan	1	971,130
17	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3,750,122
18	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,762,902
19	Bendahara	7	2,836,956
20	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	11	7,410,539
21	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	9	3,750,122
22	Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	7	2,018,011
23	Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	6	1,762,902
24	Penilik Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
25	Analisis Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	7	2,018,011
26	Pengelola data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	1,762,902
27	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	9	3,750,122
28	Analisis Sarana Pembinaan Pendidikan Masyarakat	7	2,018,011
29	Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat	7	1,762,902
30	Kepala Bidang Sekolah Dasar	11	7,410,539
31	Pengembang Kurikulum Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
32	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	2,018,011
33	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	1,762,902
34	Pengadministrasi Kurikulum	5	1,762,902
35	Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar	8	3,795,225

36	Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan	6	1,762,902
37	Pengadministrasi Kesiswaan	5	1,762,902
38	Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar	9	3,750,122
39	Analisis Sarana Pendidikan	7	2,018,011
40	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6	1,762,902
41	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama	11	7,410,539
42	Pengembang Kurikulum Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
43	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	2,018,011
44	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	1,762,902
45	Pengadministrasi Kurikulum	5	1,762,902
46	Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama	8	3,795,225
47	Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan	6	1,762,902
48	Pengadministrasi Kesiswaan	5	1,762,902
49	Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	9	3,750,122
50	Analisis Sarana Pendidikan	7	2,018,011
51	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6	1,762,902
52	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	11	7,410,539
53	Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	9	3,750,122
54	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	2,018,011
55	Analisis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	2,018,011
56	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	1,762,902
57	Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	9	3,750,122
58	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	2,018,011
59	Analisis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	2,018,011
60	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	1,762,902
61	Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
62	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	2,018,011
63	Analisis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	2,018,011
64	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6	1,762,902
65	Kepala Bidang Kebudayaan	11	7,410,539
66	Pamong Budaya Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
67	Analisis Sejarah	7	2,018,011
68	Analisis Pengembangan Cagar Budaya dan Koleksi Museum	7	2,018,011
69	Pengelola Data Sejarah	6	1,762,902
70	Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	6	1,762,902

71	Pamong Budaya Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
72	Analisis Budaya	7	2,018,011
73	Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya	7	1,762,902
74	Pengelola Data Kekayaan Budaya	6	1,762,902
75	Analisis Dokumentasi Kesenian dan Perfilman	7	2,018,011
76	Penyusun Dokumentasi Kesenian dan Perfilman	7	1,762,902
77	Pengelola Data Kesenian dan Perfilman	6	1,762,902
78	Arsiparis Terampil	6	2,018,011
79	Pamong Belajar	9	150,000
80	Pamong Budaya	6	250,000
81	Pengawas Sekolah	8	500,000
82	Penilik	8	500,000
83	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	8	2,018,011
84	Perencana	8	2,018,011
85	Pranata Komputer	6	2,018,011

	Dinas Kesehatan		
1	Kepala Dinas Kesehatan	14	23,653,817
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	12	14,539,737
3	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,018,011
5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,762,902
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,750,122
7	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,018,011
8	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,762,902
9	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
10	Pengadministrasian Umum	5	1,762,902
11	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,762,902
12	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,762,902
13	Pengelola Barang Milik Negara	6	3,336,956
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3,750,122
15	Bendahara	7	2,836,956
16	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,762,902
17	Kepala Bidang Layanan Kesehatan	11	7,410,539
18	Administrator Kesehatan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
19	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	1,742,902
20	Pengelola Program Gizi	6	1,742,902
21	Penyusun Rencana Promosi	7	1,742,902
22	Analisis Kesehatan	7	2,022,418
23	Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan kerja	7	1,841,506
24	Pengelola Data	6	1,742,902
25	Pengelola Kebidanan	6	1,742,902
26	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	7	2,022,418
27	Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas	7	1,742,902
28	Pengelola Program Imunisasi	6	1,742,902
29	Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	1,742,902
30	Pengadministrasian Program Pemberantasan Penyakit Menular	5	1,453,527
31	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	1,742,902
32	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	1,742,902
33	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	6	1,742,902
34	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	1,742,902
35	Kepala Bidang Fasilitas Pendukung Upaya Kesehatan	11	7,410,539
36	Administrator Kesehatan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122

37	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	1,742,902
38	Pengelola Data	6	1,742,902
39	Pengelola Kefarmasian	6	1,742,902
40	Pengelola Obat dan Alat -Alat Kesehatan	6	1,742,902
41	Pengelola Data	6	1,742,902
42	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,762,902
43	Pengelola Data	6	1,742,902
44	Kepala Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha	11	7,410,539
45	Administrator Kesehatan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
46	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	2,022,418
47	Pengelola Data	6	1,742,902
48	Pengelola Kefarmasian	6	1,742,902
49	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	2,022,418
50	Pengelola Data	6	1,742,902
51	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	2,022,418
52	Penyuluh Obat dan Makanan	7	1,742,902
53	Pengelola Data	6	1,742,902
54	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	11	7,410,539
55	Administrator Kesehatan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
56	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	2,022,418
57	Pengadministrasi Pelatihan	5	1,742,902
58	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	5	1,742,902
59	Pengelola Data	6	1,742,902
60	Pengadministrasi perizinan	5	1,742,902
61	Pengelola Data	6	1,742,902
62	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di bidang Kesehatan	6	1,742,902
63	Pengelola Data	6	1,742,902
64	Kepala UPTD Puskesmas Bantarkalong	8	2,308,995
65	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Bantarkalong	8	1,601,253
66	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
67	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
68	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
69	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
70	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
71	Pengemudi Ambulan	4	990,420
72	Kepala UPTD Puskesmas Bojongasih	8	2,308,995

73	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Bojongasih	8	1,601,253
74	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
75	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
76	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
77	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
78	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
79	Pengemudi Ambulan	4	990,420
80	Kepala UPTD Puskesmas Bojongsambir	8	2,308,995
81	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Bojongsambir	8	1,601,253
82	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
83	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
84	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
85	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
86	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
87	Pengemudi Ambulan	4	990,420
88	Kepala UPTD Puskesmas Ciawi	8	2,308,995
89	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Ciawi	8	1,601,253
90	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
91	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
92	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
93	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
94	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
95	Pengemudi Ambulan	4	990,420
96	Kepala UPTD Puskesmas Cibalong	8	2,308,995
97	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Cibalong	8	1,601,253
98	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
99	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
100	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
101	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
102	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
103	Pengemudi Ambulan	4	990,420
104	Kepala UPTD Puskesmas Cigalontang	8	2,308,995
105	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Cigalontang	8	1,601,253
106	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
107	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
108	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
109	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164

110	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
111	Pengemudi Ambulan	4	990,420
112	Kepala UPTD Puskesmas Cikalong	8	2,308,995
113	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Cikalong	8	1,601,253
114	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
115	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
116	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
117	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
118	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
119	Pengemudi Ambulan	4	990,420
120	Kepala UPTD Puskesmas Cikatomas	8	2,308,995
121	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Cikatomas	8	1,601,253
122	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
123	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
124	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
125	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
126	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
127	Pengemudi Ambulan	4	990,420
128	Kepala UPTD Puskesmas Cineam	8	2,308,995
129	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Cineam	8	1,601,253
130	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
131	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
132	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
133	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
134	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
135	Pengemudi Ambulan	4	990,420
136	Kepala UPTD Puskesmas Cipatujah	8	2,308,995
137	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Cipatujah	8	1,601,253
138	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
139	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
140	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
141	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
142	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
143	Pengemudi Ambulan	4	990,420
144	Kepala UPTD Puskesmas Cisayong	8	2,308,995
145	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Cisayong	8	1,601,253
146	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212

147	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
148	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
149	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
150	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
151	Pengemudi Ambulan	4	990,420
152	Kepala UPTD Puskesmas Culamega	8	2,308,995
153	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Culamega	8	1,601,253
154	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
155	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
156	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
157	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
158	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
159	Pengemudi Ambulan	4	990,420
160	Kepala UPTD Puskesmas Gunungtanjung	8	2,308,995
161	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Gunungtanjung	8	1,601,253
162	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
163	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
164	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
165	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
166	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
167	Pengemudi Ambulan	4	990,420
168	Kepala UPTD Puskesmas Jamanis	8	2,308,995
169	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Jamanis	8	1,601,253
170	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
171	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
172	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
173	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
174	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
175	Pengemudi Ambulan	4	990,420
176	Kepala UPTD Puskesmas Jatiwaras	8	2,308,995
177	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Jatiwaras	8	1,601,253
178	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
179	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
180	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
181	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
182	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
183	Pengemudi Ambulan	4	990,420

184	Kepala UPTD Puskesmas Kadipaten	8	2,308,995
185	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Kadipaten	8	1,601,253
186	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
187	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
188	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
189	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
190	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
191	Pengemudi Ambulan	4	990,420
192	Kepala UPTD Puskesmas Karangjaya	8	2,308,995
193	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Karangjaya	8	1,601,253
194	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
195	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
196	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
197	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
198	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
199	Pengemudi Ambulan	4	990,420
200	Kepala UPTD Puskesmas Karangnunggal	8	2,308,995
201	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Karangnunggal	8	1,601,253
202	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
203	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
204	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
205	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
206	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
207	Pengemudi Ambulan	4	990,420
208	Kepala UPTD Puskesmas Leuwisari	8	2,308,995
209	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Leuwisari	8	1,601,253
210	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
211	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
212	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
213	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
214	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
215	Pengemudi Ambulan	4	990,420
216	Kepala UPTD Puskesmas Mangunreja	8	2,308,995
217	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Mangunreja	8	1,601,253
218	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
219	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
220	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109

221	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
222	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
223	Pengemudi Ambulan	4	990,420
224	Kepala UPTD Puskesmas Manonjaya	8	2,308,995
225	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Manonjaya	8	1,601,253
226	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
227	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
228	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
229	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
230	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
231	Pengemudi Ambulan	4	990,420
232	Kepala UPTD Puskesmas Padakembang	8	2,308,995
233	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Padakembang	8	1,601,253
234	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
235	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
236	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
237	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
238	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
239	Pengemudi Ambulan	4	990,420
240	Kepala UPTD Puskesmas Pagerageung	8	2,308,995
241	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Pagerageung	8	1,601,253
242	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
243	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
244	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
245	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
246	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
247	Pengemudi Ambulan	4	990,420
248	Kepala UPTD Puskesmas Pancatengah	8	2,308,995
249	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Pancatengah	8	1,601,253
250	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
251	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
252	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
253	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
254	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
255	Pengemudi Ambulan	4	990,420
256	Kepala UPTD Puskesmas Parungponteng	8	2,308,995
257	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Parungponteng	8	1,601,253

258	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
259	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
260	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
261	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
262	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
263	Pengemudi Ambulan	4	990,420
264	Kepala UPTD Puskesmas Puspahiang	8	2,308,995
265	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Puspahiang	8	1,601,253
266	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
267	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
268	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
269	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
270	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
271	Pengemudi Ambulan	4	990,420
272	Kepala UPTD Puskesmas Rajapolah	8	2,308,995
273	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Rajapolah	8	1,601,253
274	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
275	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
276	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
277	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
278	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
279	Pengemudi Ambulan	4	990,420
280	Kepala UPTD Puskesmas Salawu	8	2,308,995
281	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Salawu	8	1,601,253
282	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
283	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
284	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
285	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
286	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
287	Pengemudi Ambulan	4	990,420
288	Kepala UPTD Puskesmas Salopa	8	2,308,995
289	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Salopa	8	1,601,253
290	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
291	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
292	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
293	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
294	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268

295	Pengemudi Ambulan	4	990,420
296	Kepala UPTD Puskesmas Sariwangi	8	2,308,995
297	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Sariwangi	8	1,601,253
298	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
299	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
300	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
301	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
302	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
303	Pengemudi Ambulan	4	990,420
304	Kepala UPTD Puskesmas Singaparna	8	2,308,995
305	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Singaparna	8	1,601,253
306	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
307	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
308	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
309	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
310	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
311	Pengemudi Ambulan	4	990,420
312	Kepala UPTD Puskesmas Sodonghilir	8	2,308,995
313	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Sodonghilir	8	1,601,253
314	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
315	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
316	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
317	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
318	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
319	Pengemudi Ambulan	4	990,420
320	Kepala UPTD Puskesmas Sukahening	8	2,308,995
321	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Sukahening	8	1,601,253
322	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
323	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
324	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
325	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
326	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
327	Pengemudi Ambulan	4	990,420
328	Kepala UPTD Puskesmas Sukaraja	8	2,308,995
329	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Sukaraja	8	1,601,253
330	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
331	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368

332	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
333	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
334	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
335	Pengemudi Ambulan	4	990,420
336	Kepala UPTD Puskesmas Sukarame	8	2,308,995
337	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Sukarame	8	1,601,253
338	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
339	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
340	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
341	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
342	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
343	Pengemudi Ambulan	4	990,420
344	Kepala UPTD Puskesmas Sukaratu	8	2,308,995
345	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Sukaratu	8	1,601,253
346	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
347	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
348	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
349	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
350	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
351	Pengemudi Ambulan	4	990,420
352	Kepala UPTD Puskesmas Sukaresik	8	2,308,995
353	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Sukaresik	8	1,601,253
354	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
355	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
356	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
357	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
358	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
359	Pengemudi Ambulan	4	990,420
360	Kepala UPTD Puskesmas Tanjungjaya	8	2,308,995
361	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Tanjungjaya	8	1,601,253
362	Pengelola Kepegawaian	6	1,197,212
363	Pengadministrasi Keuangan	5	1,197,368
364	Pengadministrasi Umum	5	1,148,109
365	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,196,164
366	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
367	Pengemudi Ambulan	4	990,420
368	Kepala UPTD Puskesmas Taraju	8	2,308,995

369	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Taraju	8	1,601,253
370	<i>Pengelola Kepegawaian</i>	6	1,197,212
371	<i>Pengadministrasi Keuangan</i>	5	1,197,368
372	<i>Pengadministrasi Umum</i>	5	1,148,109
373	<i>Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi</i>	5	1,196,164
374	<i>Binatu Rumah Sakit</i>	3	1,282,268
375	<i>Pengemudi Ambulan</i>	4	990,420
376	Kepala UPTD Puskesmas Tinewati	8	2,308,995
377	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Tinewati	8	1,601,253
378	<i>Pengelola Kepegawaian</i>	6	1,197,212
379	<i>Pengadministrasi Keuangan</i>	5	1,197,368
380	<i>Pengadministrasi Umum</i>	5	1,148,109
381	<i>Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi</i>	5	1,196,164
382	<i>Binatu Rumah Sakit</i>	3	1,282,268
383	<i>Pengemudi Ambulan</i>	4	990,420
384	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan	8	2,308,995
385	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan	8	1,601,253
386	<i>Pengelola Kepegawaian</i>	6	1,197,212
387	<i>Pengadministrasi Keuangan</i>	5	1,197,368
388	<i>Pengadministrasi Umum</i>	5	1,148,109
389	<i>Pengelola Laboratorium</i>	6	1,742,902
390	<i>Dokter</i>	9	1,500,000
391	<i>Pranata Laboratorium Kesehatan</i>	9	1,841,506
392	<i>Sanitarian</i>	6	1,841,506
393	Kepala UPTD Farmasi	8	2,308,995
394	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Farmasi	8	1,601,253
395	<i>Pengelola Kepegawaian</i>	6	1,197,212
396	<i>Pengadministrasi Keuangan</i>	5	1,197,368
397	<i>Pengadministrasi Umum</i>	5	1,148,109
398	<i>Pengelola Kefarmasian</i>	6	1,197,212
399	<i>Administrator Kesehatan</i>	8	1,841,506
400	<i>Entomolog Kesehatan</i>	9	1,841,506
401	<i>Epidemiolog Kesehatan</i>	9	1,841,506
402	<i>Nutrisionis</i>	9	1,841,506
403	<i>Pengawas Farmasi dan Makanan</i>	9	1,841,506
404	<i>Penyuluh Kesehatan Masyarakat</i>	9	1,841,506
405	<i>Sanitarian</i>	9	1,841,506

406	Apoteker	8	1,841,506
407	Asisten Apoteker	9	1,841,506
408	Perawat	9	1,841,506
409	Bidan	9	1,841,506
410	Direktur RS SMC	12	7,105,725
411	Kepala Bagian Tata Usaha RS SMC	11	3,528,995
412	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	2,287,199
413	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1,254,838
414	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,136,227
415	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Diklat	9	2,287,199
416	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	1,254,838
417	Analisis Diklat	7	1,254,838
418	Pengelola Kepegawaian	6	1,136,227
419	Pengadministrasian Umum	5	1,136,211
420	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,236,227
421	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6	1,136,227
422	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	1,136,227
423	Pengadministrasian Pengaduan Publik	5	1,136,211
424	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,136,227
425	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9	2,287,199
426	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,136,227
427	Bendahara	7	2,091,397
428	Pengelola Barang Milik Negara	6	1,953,705
429	Pengadministrasian Penerimaan	5	1,136,211
430	Pengelola Akuntansi	6	1,136,227
431	Verifikator Keuangan	6	1,136,227
432	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	1,136,227
433	Kepala Bidang Pelayanan	11	3,528,995
434	Kepala Seksi Pelayanan Medik	8	2,287,157
435	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	1,136,227
436	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	1,136,227
437	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	6	1,136,227
438	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	1,136,227
439	Verifikator Medis	6	1,136,227
440	Kepala Seksi Keperawatan	8	2,287,157
441	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	1,136,227
442	Pengelola Keperawatan	6	1,136,227

443	Pengelola Kebidanan	6	1,136,227
444	Kepala Bidang Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11	3,528,995
445	Kepala Seksi Penunjang Klinik	8	2,287,157
446	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	1,136,227
447	Pengelola Kefarmasian	6	1,136,227
448	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	1,136,227
449	Pengelola Obat dan Alat - Alat Kesehatan	6	1,136,227
450	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	1,136,227
451	Pengolah Makanan	6	1,136,227
452	Pranata Jamuan	5	1,136,227
453	Kepala Seksi Penunjang Non Klinik	9	2,287,199
454	Juru rawat Jenazah	3	1,136,227
455	Binatu Rumah Sakit	3	1,282,268
456	Pengemudi Ambulan	4	1,136,343
457	Pengelola Kemasyarakatan Spiritual	6	1,136,227
458	Pengelola instalasi	6	1,136,227
459	Pengelola Limbah	6	1,136,227
460	Kepala Bidang Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11	3,528,995
461	Kepala Seksi Pendayagunaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	2,287,157
462	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	1,236,227
463	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	1,136,227
464	Teknisi Jaringan Instalasi	5	1,136,227
465	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	1,136,227
466	Pengelola Obat dan Alat - Alat Kesehatan	6	1,136,227
467	Pemelihara Kendaraan	5	1,136,227
468	Kepala Seksi Pendayagunaan Pendukung Pelayanan Kesehatan	8	2,287,157
469	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	1,136,227
470	Pengelola Sarana dan Prasarana Taman	6	1,136,227
471	Teknisi Listrik dan Jaringan	5	1,136,227
472	Administrator Kesehatan	8	400,000
473	Apoteker	8	1,000,000
474	Asisten Apoteker	8	750,000
475	Arsiparis	6	2,022,418
476	Bidan	6	600,000
477	Dokter Umum	9	1,500,000
478	Dokter Gigi	9	1,500,000
479	Dokter Spesialis Kandungan	12	5,000,000

480	Dokter Spesialis Dalam	12	5,000,000
481	Dokter Spesialis Bedah	12	5,000,000
482	Dokter Spesialis Anak	12	5,000,000
483	Dokter Spesialis Anastesi	12	5,000,000
484	Dokter Spesialis Radiology	12	5,000,000
485	Dokter Spesialis Patologi Klinis	12	5,000,000
486	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	12	5,000,000
487	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	12	5,000,000
488	Dokter Spesialis Bedah Plastik	12	5,000,000
489	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	12	5,000,000
490	Dokter Spesialis THT	12	5,000,000
491	Dokter Spesialis Mata	12	5,000,000
492	Dokter Spesialis Jantung	12	5,000,000
493	Dokter Spesialis Jiwa	12	5,000,000
494	Dokter Spesialis Saraf	12	5,000,000
495	Dokter Spesialis Paru	12	5,000,000
496	Dokter Spesialis Bedah Saraf	12	5,000,000
497	Dokter Spesialis Urologi	12	5,000,000
498	Dokter Spesialis Orthopedi	12	5,000,000
499	Dokter Spesialis Forensik	12	5,000,000
500	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	12	5,000,000
501	Dokter Spesialis Bedah Mulut	12	5,000,000
502	Dokter Spesialis Orthodontist	12	5,000,000
503	Dokter Spesialis Endodontist	12	5,000,000
504	Dokter Spesialis Prosthodontist	12	5,000,000
505	Dokter Spesialis Pedodontist	12	5,000,000
506	Dokter Spesialis Penyakit Mulut	12	5,000,000
507	Dokter Spesialis Periodontist	12	5,000,000
508	Dokter Spesialis Bedah Onkologi	12	5,000,000
509	Entomolog Kesehatan Terampil	6	600,000
510	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	600,000
511	Fisioterapis terampil	6	600,000
512	Nutrisisionis terampil	8	783,102
513	Okupasi Terapis terampil	6	600,000
514	Ortotis Prostetis	6	600,000
515	Pembimbing Kesehatan Kerja	8	200,000
516	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	8	261,034
517	Perawat Terampil	6	600,000

518	Perekam Medis Terampil	8	522,068
519	Pranata Laboratorium Kesehatan	9	400,000
520	Psikolog Klinis	8	600,000
521	Radiografer Terampil	8	522,068
522	Refraksionis Optisien Terampil	6	400,000
523	Sanitarian Terampil	8	783,102
524	Teknisi elektro medis terampil	6	400,000
525	Teknisi Gigi Terampil	8	522,068
526	Teknisi Transfusi darah Terampil	8	522,068
527	Terapis Gigi dan Mulut	6	400,000
528	Terapi wicara Pemula	5	400,000
529	Penata Anestesi	8	400,000
530	Asisten Penata Anestesi	6	400,000
531	Perencana	8	2,032,418
532	Direktur RSUD Tani dan Nelayan Cikatomas	11	5,493,614
533	Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Tani dan Nelayan	9	2,287,199
534	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,090,440
535	Bendahara	7	1,254,838
536	Pengadministrasi Keuangan	5	909,394
537	Pengadministrasi Umum	5	947,578
538	Pengelola Kepegawaian	6	1,136,227
539	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,307,528
540	Pengelola Barang Milik Negara	6	1,136,227
541	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	8	1,838,312
542	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	1,136,227
543	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	1,362,414
544	Pengelola Keperawatan	6	1,074,267
545	Pengelola Kebidanan	6	1,136,227
546	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	947,578
547	Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan	8	1,838,312
548	Pengelola Obat dan Alat - Alat Kesehatan	6	1,136,227
549	Pengolah Makanan	6	1,817,400
550	Pranata Jamuan	5	1,629,330
551	Juru rawat Jenazah	3	556,406
552	Binatu Rumah Sakit	3	464,031
553	Pengelola instalasi	6	1,136,227
554	Pengelola Limbah	6	1,136,227
555	Pengemudi Ambulan	4	812,781

556	Dokter Umum	9	1,500,000
557	Dokter Gigi	9	1,500,000
558	Dokter Spesialis Kandungan	9	2,925,000
559	Dokter Spesialis Dalam	9	2,925,000
560	Dokter Spesialis Bedah	9	2,925,000
561	Dokter Spesialis Anak	9	2,925,000
562	Perawat	8	2,350,938
563	Bidan	8	2,350,938
564	Apoteker	8	2,350,938
565	Asisten Apoteker	8	2,350,938
566	Perekam Medis Terampil	8	2,350,938
567	Nutrisisionis terampil	8	2,350,938
568	Radiografer Terampil	8	2,350,938
569	Penata Anestesi	8	2,350,938
570	Asisten Penata Anestesi	8	2,350,938
571	Sanitarian Terampil	8	2,350,938
572	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	8	2,350,938
573	Teknisi Gigi Terampil	8	2,350,938
574	Terapis Gigi dan Mulut	8	2,350,938
575	Pranata Laboratorium Kesehatan	8	2,350,938
576	Teknisi Transfusi darah Terampil	8	2,350,938
577	Patologi Klinis	8	2,350,938
578	Perencana	8	2,350,938
579	Arsiparis	8	2,350,938
580	Pranata Komputer	8	2,350,938

	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	23,653,817
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	14,569,737
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,750,122
4	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,039,112
5	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,762,902
6	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
7	Pengadministrasi Umum	5	1,762,902
8	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,762,902
9	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,762,902
10	Pengelola Barang Milik Negara	6	2,816,970
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	3,750,122
12	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,039,112
13	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,762,902
14	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,762,902
15	Bendahara	7	2,836,956
16	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11	7,410,539
17	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama	8	3,750,038
18	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	1,762,902
19	Pengelola Informasi Kerjasama	6	1,762,902
20	Pengelola Pemantauan	6	1,762,902
21	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	8	3,750,038
22	Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi	6	1,762,902
23	Pengelola Pengendalian Masyarakat	6	1,762,902
24	Pengelola Sarana Operasi	6	1,762,902
25	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	11	7,410,539
26	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	9	3,750,122
27	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7	2,032,418
28	Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran	7	1,762,902
29	Penyidik	7	1,762,902
30	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	6	1,762,902
31	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan	9	3,750,122
32	Analisis Pengawasan	7	2,032,418
33	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	1,762,902
34	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	11	7,410,539
35	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat	9	3,750,122

36	Penyuluh Kemasyarakatan	7	1,762,902
37	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	1,762,902
38	Pengelola Bimbingan Masyarakat	6	1,762,902
39	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	8	3,750,038
40	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	1,762,902
41	Pengelola Data	6	1,762,902
42	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	5	1,762,902
43	Arsiparis	6	2,022,418
44	Perencana	10	2,018,011
45	Polisi Pamong Praja Terampil pelaksana, Ahli Muda, pertama	5	1,944,052
46	Pranata Komputer	6	2,018,011

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	25,654,082
2	Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	14,569,737
3	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,050,615
5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,762,902
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,750,122
7	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,050,615
8	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,762,902
9	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
10	Pengadministrasian Umum	5	1,762,902
11	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,762,902
12	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,762,902
13	Pengelola Barang Milik Negara	6	3,336,956
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3,750,122
15	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,762,902
16	Bendahara	7	2,836,956
17	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana	11	7,410,539
18	Pekerja Sosial Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
19	Analisis Bencana	7	2,050,615
20	Pranata Bencana	6	1,762,902
21	Pengelola Data Bantuan Sosial	6	1,762,902
22	Pengelola Logistik	6	1,762,902
23	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	7	2,050,615
24	Analisis Jaminan Sosial	7	2,050,615
25	Analisis Masalah Sosial	7	2,050,615
26	Pengelola Data	6	1,236,164
27	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	11	7,410,539
28	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
29	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	7	2,050,615
30	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	6	1,762,902
31	Pengadministrasian Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	7	1,687,229
32	Analisis Pelayanan Sosial	7	2,050,615
33	Pengolah data pelayanan	5	1,762,902
34	Penyuluh Bimbingan atau Konseling Eks Penyandang Penyakit Sosial	7	1,762,902

35	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	6	1,762,902
36	Pengelola Pembinaan Bantuan	6	1,762,902
37	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	7,410,539
38	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,998,910
39	Analisis Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	7	2,050,615
40	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan KB	7	1,762,943
41	Pengawas Kependudukan	7	2,032,418
42	pengelola advokasi konseling dan pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	6	1,762,902
43	Pengelola pelayanan dan pembinaan Kelembagaan keluarga berencana	6	1,762,902
44	Pengelola Gudang	6	1,762,902
45	pengelola bina kesejahteraan keluarga	6	1,762,902
46	pengelola pembinaan ketahanan keluarga	6	1,762,902
47	pengelola pelayanan dan pembinaan kelembagaan keluarga berencana	6	1,762,902
48	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	7,410,539
49	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
50	Analisis Kelembagaan Masyarakat	7	2,050,615
51	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	1,762,902
52	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
53	<i>Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	6	1,762,902
54	Analisis Perlindungan Perempuan	7	2,050,615
55	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7	2,050,615
56	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	1,762,902
57	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak I	8	3,538,995
58	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	8	3,498,723
59	Pengelola Kepegawaian	6	1,135,875
60	Pengadministrasi Keuangan	5	1,132,953
61	Pengadministrasi Umum	5	1,132,953
62	Pengawas Perempuan dan Anak	7	1,150,268
63	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	1,135,875
64	Arsiparis	6	2,032,418
65	Pekerja Sosial	5	2,032,418
66	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	5	2,032,418
67	Penggerak Swadaya Masyarakat	7	2,032,418
68	Penyuluh Sosial	6	2,032,418
69	Perencana	8	2,032,418
70	Pranata Komputer	6	2,032,418

	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	25,654,082
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	14,569,737
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	3,750,122
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,032,418
5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,762,902
6	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,762,902
7	Bendahara	7	2,980,241
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,750,122
9	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,032,418
10	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,762,902
11	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
12	Pengadministrasi Umum	5	1,762,902
13	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,762,902
14	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,762,902
15	Pengelola Barang Milik Negara	6	2,836,956
16	Kepala Bidang Administrasi Desa	11	7,410,539
17	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
18	Analisis Produk Hukum	7	2,032,418
19	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	1,762,902
20	Pengelola penyelenggaraan diklat	6	1,762,902
21	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
22	Analisis Transfer Dana Daerah	7	2,032,418
23	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7	2,032,418
24	Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa	6	1,762,902
25	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	6	1,762,902
26	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	11	7,410,539
27	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
28	Pengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	6	1,762,902
29	Analisis Penataan Daerah	7	2,032,418
30	Penyusun program pembinaan komunitas adat	7	1,762,902
31	Pengelola Data	6	1,762,902
32	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	1,762,902
33	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7	2,032,418
34	Pengelola Kerjasama dan Investasi	6	1,762,902

35	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	11	7,410,539
36	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
37	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	1,762,902
38	Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	6	1,762,902
39	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
40	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6	1,762,902
41	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	1,762,902
42	Arsiparis Terampil	6	2,036,206
43	Penggerak Swadaya Masyarakat	8	2,032,418
44	Perencana	8	2,032,418
45	Pranata Komputer	6	2,032,418

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan			
1	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	14	23,653,817
2	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	12	14,569,737
3	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,036,206
5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,808,313
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,750,122
7	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,036,206
8	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,808,313
9	Pengelola Kepegawaian	6	1,808,313
10	Pengadministrasi Umum	5	1,762,902
11	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,809,058
12	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,808,313
13	Pengelola Barang Milik Negara	6	2,862,405
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3,750,122
15	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,808,313
16	Bendahara	7	2,836,956
17	Kepala Bidang Koperasi	11	7,410,539
18	Pengawas Koperasi Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
19	Analisis Koperasi	7	2,036,206
20	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6	1,808,313
21	Penyuluh Koperasi	7	2,032,418
22	Penyuluh Koperasi	7	2,032,418
23	Pranata Koperasi	6	1,806,956
24	Analisis Pengawasan	7	2,036,206
25	Pengolah Data Laporan Penilaian	6	1,806,956
26	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11	7,410,539
27	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
28	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	7	1,806,956
29	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	7	1,806,956
30	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	1,808,313
31	Pengelola Data	6	1,808,313
32	Penyusun Promosi dan Kerjasama	7	1,806,956
33	Pengolah Data Kebijakan dan Strategi Pembiayaan	6	1,806,956
34	Kepala Bidang Perindustrian	11	7,410,539
35	Pembina Industri Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
36	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri	7	1,806,956

37	Pengawas Industri	7	1,806,956
38	Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha Industri	6	1,808,313
39	Pengawas Industri	7	1,806,956
40	Analisis Industri	7	2,036,206
41	Pengelola data	6	1,808,313
42	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan	11	7,410,539
43	Analisis Perdagangan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
44	Fasilitator Perdagangan	7	1,806,956
45	Penyusun Rencana Informasi Pasar Dalam Negeri	7	1,806,956
46	Pengelola fasilitasi dan mediasi pembangunan usaha perdagangan ekspor impor	6	1,808,313
47	Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri	7	1,806,956
48	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	6	1,808,313
49	Pengawas usaha operasi produksi dan pemasaran	7	1,806,956
50	Pengelola data	6	1,808,313
51	Fasilitator Perdagangan	7	1,806,956
52	Kepala Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal	11	7,410,539
53	Analisis Perdagangan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
54	Pengelola penataan sarana dan prasarana	6	1,808,313
55	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	7	1,806,956
56	Pengelola Pasar	6	1,808,313
57	Pengelola Data	6	1,808,313
58	Pengawas Kemetrologian Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
59	Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan	7	1,806,956
60	Petugas Standarisasi dan Sertifikasi	7	1,806,956
61	Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen	6	1,808,313
62	Pengolah Data Dukungan Pengawasan	6	1,806,956
63	Pengelola Laboratorium	6	1,806,956
64	Kepala UPTD Pengelola Pasar Singaparna	8	3,949,891
65	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Pasar Singaparna	8	3,135,765
66	Pengelola Kepegawaian	6	1,590,225
67	Pengadministrasi Keuangan	5	1,515,800
68	Pengadministrasi Umum	5	1,439,873
69	Juru Pungut Retribusi	3	1,293,625
70	Kepala UPTD Pengelola Pasar Ciawi	8	3,949,891
71	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Pasar Ciawi	8	3,135,765

72	Pengelola Kepegawaian	6	1,590,225
73	Pengadministrasi Keuangan	5	1,515,800
74	Pengadministrasi Umum	5	1,439,873
75	Juru Pungut Retribusi	3	1,293,625
76	Kepala UPTD Pengelola Pasar Manonjaya	8	3,949,891
77	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Pasar Manonjaya	8	3,135,765
78	Pengelola Kepegawaian	6	1,590,225
79	Pengadministrasi Keuangan	5	1,515,800
80	Pengadministrasi Umum	5	1,439,873
81	Juru Pungut Retribusi	3	1,293,625
82	Kepala UPTD Pengelola Pasar Taraju	8	3,949,891
83	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Pasar Taraju	8	3,135,765
84	Pengelola Kepegawaian	6	1,590,225
85	Pengadministrasi Keuangan	5	1,515,800
86	Pengadministrasi Umum	5	1,439,873
87	Juru Pungut Retribusi	3	1,293,625
88	Arsiparis Terampil	6	2,036,206
89	Penera Terampil, Ahli Pertama	8	2,036,206
90	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama, Muda	9	2,036,206
91	Perencana	10	2,032,418
92	Pranata Komputer	6	2,032,418

	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
1	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	14	23,653,817
2	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12	14,515,780
3	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	1,910,915
5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,762,902
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,750,122
7	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	1,910,915
8	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,762,902
9	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
10	Pengadministrasi Umum	5	1,682,750
11	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,762,902
12	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,762,902
13	Pengelola Barang Milik Negara	6	2,816,499
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3,750,122
15	Bendahara	7	2,816,499
16	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,762,902
17	Kepala Bidang Pariwisata	11	7,410,539
18	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
19	Analisis Objek Wisata	7	1,910,915
20	Pengelola Objek Wisata	6	1,762,902
21	Pengelola Sarana Wisata	6	1,762,902
22	Pengelola Wisma	6	1,762,902
23	Pengelola Perparkiran	6	1,762,902
24	Pranata Taman	5	1,762,902
25	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	7	1,910,915
26	Pengelola Usaha Kepariwisata	6	1,762,902
27	Pengawas Kepariwisata	7	1,762,902
28	Analisis Pemasaran dan Kerjasama	7	1,910,915
29	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	6	1,762,902
30	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	11	7,410,539
31	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,750,122
32	Analisis Ekonomi Kreatif	7	1,910,915
33	Penyuluh Perekonomian	7	1,762,902
34	Fasilitator Kemitraan	7	1,762,902
35	Pengolah Data Pembinaan Kelembagaan Investasi	6	1,762,902
36	Kepala Bidang Kepemudaan	11	7,410,539

37	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,859,137
38	Analisis Kepemudaan	7	1,910,915
39	Penyuluh Kepemudaan	7	1,762,902
40	Pengelola Data	6	1,762,902
41	Analisis Kepemudaan	7	1,910,915
42	Fasilitator Kewirausahaan	7	1,762,902
43	Kepala Bidang Olahraga	11	7,410,539
44	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
45	Analisis Keolahragaan	7	1,910,915
46	Penyuluh Olah Raga	7	1,762,902
47	Pengelola Data	6	1,762,902
48	Analisis Keolahragaan	7	1,910,915
49	Penyuluh Olah Raga	7	1,762,902
50	Pengelola Data	6	1,762,902
51	Pengelola Sarana Olahraga	6	1,762,902
52	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1,762,902
53	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	8	1,910,915
54	Arsiparis	6	1,910,915
55	Pelatih Olahraga	8	1,910,915
56	Asisten Pelatih Olahraga	5	1,910,915
57	Perencana	10	1,910,915
58	Pranata Komputer	6	1,910,915

	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		
1	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	14	23,653,817
2	Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	12	14,569,737
3	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,689,031
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,032,418
5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,762,902
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,689,031
7	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,032,418
8	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,762,902
9	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
10	Pengadministrasian Umum	5	1,691,229
11	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,762,902
12	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,762,902
13	Pengelola Barang Milik Negara	6	2,836,956
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3,689,031
15	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,762,902
16	Bendahara	7	2,875,671
17	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	11	7,410,539
18	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,689,031
19	Analisis Potensi Budidaya Serealia	7	2,032,418
20	Analisis Potensi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	7	2,032,418
21	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	1,762,902
22	Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	6	1,762,902
23	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	7	2,032,418
24	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	7	2,032,418
25	Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan	7	1,762,902
26	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	1,762,902
27	Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	6	1,762,902
28	Analisis Ekstensifikasi	7	2,032,418
29	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	7	2,032,418
30	Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	6	1,762,902
31	Pengelola Penilai Usaha Perkebunan	6	1,762,902
32	Pengelola Terminal Agribisnis dan Pendataan Distribusi Komoditi Pertanian dan Perkebunan	6	1,762,902
33	Kepala Bidang Penyuluhan	11	7,410,539
34	Penyuluh Pertanian Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,689,031
35	Analisis Kapasitas Penyuluh	7	2,032,418

36	Analisis Program Penyuluhan	7	2,032,418
37	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	6	1,762,902
38	Pengelola Database Profesi SDM Pertanian	6	1,762,902
39	Pengelola Database Kelembagaan Petani	6	1,762,902
40	Pengelola bahan Perencanaan dan pelaporan usaha tani	6	1,762,902
41	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	11	7,410,539
42	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,689,031
43	Analisis Lahan Pertanian	7	2,032,418
44	Pengawas Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi	7	1,762,902
45	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	6	1,762,902
46	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,689,031
47	Analisis Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	7	2,032,418
48	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	7	1,762,902
49	Pemeriksa Pupuk dan Pestisida	7	1,762,902
50	Analisis Pembiayaan Pertanian	7	2,032,418
51	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	7	2,032,418
52	Pengelola Data	6	1,762,902
53	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	7,410,539
54	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,689,031
55	Pengawas Mutu Bibit Ternak	7	1,762,902
56	Penata Dokumen Hasil Produksi	6	1,762,902
57	Analisis Pakan Ternak	7	2,032,418
58	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya	6	1,762,902
59	Pengelola Peternakan	6	1,762,902
60	Medik Veteriner Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,689,031
61	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	7	1,762,902
62	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7	1,762,902
63	Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan	7	1,762,902
64	Pengelola Usaha Pematangan Ternak atau Unggas dan Lalu Lintas Daging	6	1,762,902
65	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil, dan Unggas	6	1,762,902
66	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	11	7,410,539
67	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,689,504
68	Analisis Pangan	7	2,032,418
69	Penyuluh Pangan	7	1,762,902
70	Pengelola Pola Pangan Harapan	6	1,762,902

71	Pengelola Ketahanan Pangan	6	1,762,902
72	Analisis Pangan	7	2,032,418
73	Penyuluh Pangan	7	1,762,902
74	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	1,762,902
75	Pengelola Ketahanan Pangan	6	1,762,902
76	Analisis Pangan	7	2,032,418
77	Penyuluh Pangan	7	1,762,902
78	Pengawas Harga Pangan	7	1,762,902
79	Pengelola Ketahanan Pangan	6	1,762,902
80	Kepala Bidang Perikanan	11	7,410,539
81	Pengawas Perikanan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,689,031
82	Analisis Perikanan Budidaya	7	2,032,418
83	Analisis Potensi Perbenihan	7	2,032,418
84	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya	7	1,762,902
85	Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	6	1,762,902
86	Pengelola Statistik Perikanan	6	1,762,902
87	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	1,762,902
88	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,689,031
89	Analisis Kenelayanan	7	2,032,418
90	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	7	2,032,418
91	Pengelola Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	6	1,762,902
92	Pengelola Statistik Perikanan	6	1,762,902
93	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,689,031
94	Analisis Perlindungan dan Pelestarian Ikan	7	2,032,418
95	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan	7	2,032,418
96	Analisis Mutu Hasil Perikanan	7	2,032,418
97	Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	6	1,762,902
98	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	1,762,902
99	Analisis Ketahanan Pangan	8	2,032,418
100	Analisis Pasar Hasil Perikanan	8	2,032,418
101	Analisis Pasar Hasil Pertanian	8	2,032,418
102	Arsiparis	6	2,032,418
103	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	10	2,032,418
104	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	7	1,762,902
105	Penyuluh Pertanian Madya	11	1,500,000
106	Penyuluh Pertanian Muda	9	1,350,000

107	Penyuluh Pertanian Pertama	8	1,250,000
108	Penyuluh Pertanian Terampil	6	1,200,000
109	Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1,250,000
110	Penyuluh Pertanian Mahir	7	1,200,000
111	Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	1,150,000
112	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	1,100,000
113	Perencana	8	2,045,864
114	Pranata Komputer	6	2,032,418
115	Arsiparis	6	2,032,418
116	Medik Veteriner Madya	11	1,500,000
117	Medik Veteriner Muda	9	1,350,000
118	Medik Veteriner Pertama	8	1,250,000
119	paramedik veteriner Terampil	6	1,150,000
120	paramedik veteriner Penyelia	8	1,250,000
121	Paramedik Veteriner Pelaksana	6	1,150,000
122	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	9	1,350,000
123	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	1,250,000
124	Pengawas Bibit Ternak Penyelia	8	1,250,000
125	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	7	1,200,000
126	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya	11	1,500,000
127	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	1,350,000
128	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	1,250,000
129	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Terampil	6	1,226,745
130	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	9	1,350,000
131	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	8	1,250,000
132	Pengawas Mutu Pakan Terampil	6	1,150,000
133	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	6	1,194,940
134	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	6	1,194,673
135	Kepala UPTD pertanian Wilayah Ciawi	8	3,468,846
136	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
137	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
138	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
139	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	1,194,673
140	Kepala UPTD pertanian Wilayah Singaparna	8	3,468,846
141	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
142	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
143	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
144	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	1,194,673

145	Kepala UPTD pertanian Wilayah Taraju	8	3,468,846
146	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
147	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
148	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
149	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	1,194,673
150	Kepala UPTD pertanian Wilayah Karangnunggal	8	3,468,846
151	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
152	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
153	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
154	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	1,194,673
155	Kepala UPTD pertanian Wilayah Cikatomas	8	3,468,846
156	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
157	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
158	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
159	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	1,194,673
160	Kepala UPTD pertanian Wilayah Manonjaya	8	3,468,846
161	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
162	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
163	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
164	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	1,194,673
165	Kepala UPTD pertanian Wilayah Sukaraja	8	3,468,846
166	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
167	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
168	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
169	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	1,194,673
170	Kepala UPTD Perbibitan Ternak	8	3,468,846
171	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
172	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
173	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
174	Perawat Ternak	3	1,194,673
175	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	8	3,468,846
176	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
177	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
178	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
179	Pengelola Rumah Potong Hewan	6	1,194,673
180	Juru Pungut Retribusi	3	998,529
181	Kepala UPTD Pasar Hewan	8	3,468,846
182	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902

183	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
184	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
185	Juru Pungut Retribusi	3	998,529
186	Kepala UPTD Laboratorium Veteriner	8	3,468,846
187	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
188	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
189	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
190	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	1,194,673
191	Pramu Laboratorium	5	1,194,673
192	Kepala UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan	8	3,468,846
193	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	3,021,253
194	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
195	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
196	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
197	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	1,762,902
198	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan	8	3,468,846
199	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	3,021,253
200	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
201	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
202	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
203	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	1,194,673
204	Kepala UPTD Balai Benih Ikan	8	3,468,846
205	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	3,021,253
206	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
207	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
208	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
209	Pramu Benih Ikan	1	1,194,673
210	Kepala UPTD Tempat Pelelengan Ikan	8	3,468,846
211	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	3,021,253
212	Pengelola Kepegawaian	6	1,762,902
213	Pengadministrasi Keuangan	5	1,292,353
214	Pengadministrasi Umum	5	1,691,229
215	Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	6	1,762,902
216	Juru Pungut Retribusi	3	998,529

	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	26,559,150
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	16,067,528
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,135,466
4	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,051,562
5	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	2,001,562
6	Pengelola Kepegawaian	6	2,001,562
7	Pengadministrasian Umum	5	2,001,562
8	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	2,001,562
9	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	2,001,562
10	Pengelola Barang Milik Negara	6	3,094,346
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	4,135,466
12	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,051,562
13	Pengelola Bahan Perencanaan	6	2,001,562
14	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	2,001,562
15	Bendahara	7	3,094,346
16	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	8,044,013
17	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda (Penyetaraan jabatan)	9	4,135,466
18	Pengadministrasian Kependudukan	5	2,001,562
19	Pengawas Kependudukan	6	2,001,562
20	Pengelola Mutasi Penduduk	6	2,001,562
21	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	2,051,562
22	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	8,044,013
23	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda (Penyetaraan jabatan)	9	4,135,466
24	Pengadministrasian Akta Kelahiran dan Kematian	5	2,001,562
25	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	2,051,562
26	Pengadministrasian Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	5	2,001,562
27	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	2,051,562
28	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	11	8,044,013
29	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda (Penyetaraan jabatan)	9	4,135,466
30	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	2,001,562
31	Penyusun Analisis Dampak Kependudukan	7	2,001,562
32	Pengelola Informasi Kerjasama	6	2,001,562
33	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	7	2,001,562
34	Administrator Database Kependudukan	8	2,001,562
35	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	2,001,562
36	Arsiparis	6	2,001,562
37	Perencana	8	1,434,377
38	Pranata Komputer	6	2,036,206

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja			
1	Kepala Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja	14	23,653,817
2	Sekretaris Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja	12	14,569,737
3	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,036,206
5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,806,956
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,750,122
7	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,036,206
8	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,806,956
9	Pengelola Kepegawaian	6	1,806,956
10	Pengadministrasian Umum	5	1,806,956
11	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,806,956
12	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,806,956
13	Pengelola Barang Milik Negara	6	2,844,640
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3,750,122
15	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,806,956
16	Bendahara	7	2,844,640
17	Kepala Bidang Penanaman Modal	11	7,410,539
18	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
19	Analisis Penanaman Modal	7	2,036,206
20	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal	6	1,806,956
21	Pengelola Pengembangan Investasi	6	1,806,956
22	Penyusun Promosi dan Kerjasama	7	1,806,956
23	Pengelola Data Pengembangan Investasi	6	1,806,956
24	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
25	Pengawas Penanaman Modal	7	1,806,956
26	Pengelola Data	6	1,806,956
27	Kepala Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	11	7,410,539
28	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
29	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6	1,806,956
30	Pengelola Data Bimbingan Pendaftaran	6	1,806,956
31	Pengelola Perizinan	6	1,806,956
32	Pengelola Dokumen Perizinan	6	1,806,956
33	Pengelola Pengaduan Publik	6	1,806,956
34	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	6	1,806,956
35	Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	11	7,410,539
36	Kepala Seksi Ketenagakerjaan	9	3,750,122

37	Analisis Tenaga Kerja	7	2,036,206
38	Pengelola Tenaga Kerja Indonesia	6	1,806,956
39	Pengelola Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	1,806,956
40	Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha Industri	6	1,806,956
41	Kepala Seksi Transmigrasi	8	3,824,875
42	Pengelola Ketransmigrasian	6	1,806,956
43	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja	8	3,824,875
44	Kepala Subbag Tata Usaha	8	3,824,875
45	Pengelola Kepegawaian	6	1,806,956
46	Pengadministrasi Keuangan	5	1,377,750
47	Pengadministrasi Umum	5	1,806,956
48	Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas	6	1,295,250
49	Arsiparis	6	2,036,206
50	Instruktur	6	2,036,206
51	Mediator Hubungan industrial	8	2,036,206
52	Pengantar Kerja	8	2,036,206
53	Penggerak Swadaya Masyarakat	7	2,036,206
54	Perencana	10	2,036,206
55	Pranata Komputer	6	2,036,206

	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
1	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14	23,653,817
2	Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12	14,569,737
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,035,768
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,036,206
5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,855,686
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,035,768
7	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,036,206
8	<i>Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas</i>	6	1,855,686
9	Pengelola Kepegawaian	6	1,855,686
10	Pengadministrasi Umum	5	1,775,004
11	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,855,686
12	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,855,686
13	Pengelola Barang Milik Negara	6	2,924,842
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4,035,768
15	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,855,686
16	Bendahara	7	2,924,842
17	Kepala Bidang Lalu Lintas	11	7,410,539
18	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	9	4,035,768
19	Analisis Teknik Survei Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	7	2,036,206
20	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	6	1,855,686
21	Perencana Lalu Lintas (Traffic Planner)	7	1,855,686
22	Penelaah Andalalin	7	1,855,686
23	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi	9	4,035,768
24	Analisis Lalu Lintas	7	2,036,206
25	Pengawas Lalu Lintas Darat	7	1,855,686
26	Pengatur Lalu Lintas Jalan	6	1,855,686
27	Pengolah Data	6	1,855,686
28	Penelaah Audit Keselamatan Jalan	7	1,855,686
29	Kepala Bidang Angkutan	11	7,410,539
30	Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan	9	4,035,768
31	Analisis Angkutan Darat	7	2,036,206
32	Pengelola Usaha Angkutan	6	1,855,686
33	Pengawas Keselamatan Angkutan	7	1,855,686
34	Kepala Seksi Jaringan Transportasi	9	4,035,768
35	Analisis Perizinan Transportasi	7	2,036,206
36	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	6	1,855,686

37	Teknisi Survei Jaringan Transportasi	5	1,855,686
38	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	11	7,410,539
39	Kepala Seksi Sarana Lalu Lintas	9	4,035,768
40	Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	7	2,036,206
41	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	6	1,855,686
42	Teknisi Listrik dan Jaringan	5	1,855,686
43	Kepala Seksi Teknik Prasarana Angkutan	9	4,035,768
44	Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan	7	1,855,686
45	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	1,855,686
46	Pengelola Sarana Angkutan	6	1,855,686
47	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11	7,410,539
48	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	4,035,768
49	Analisis Data dan Informasi	7	2,036,206
50	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	6	1,855,686
51	Pengelola Pengaduan Publik	6	1,855,686
52	Pengelola Situs atau Web	6	1,855,686
53	Perancang Grafis	7	1,855,686
54	Analisis Publikasi	7	2,036,206
55	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6	1,855,686
56	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	6	1,855,686
57	Pengelola Dokumentasi	6	1,855,686
58	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	11	7,410,539
59	Pranata Komputer (Penyetaraan Jabatan)	9	4,035,768
60	Pemeriksa Teknologi Informasi	7	1,855,686
61	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	1,855,686
62	Pranata Komputer (Penyetaraan Jabatan)	9	4,035,768
63	Analisis Sistem Informasi	7	2,036,206
64	Pengelola Teknologi Informasi	6	1,855,686
65	Kepala Seksi Persandian	9	4,035,768
66	Pengelola Data Persandian	6	1,855,686
67	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6	1,855,686
68	Kepala UPTD Pengelola Terminal	8	4,044,287
69	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Terminal	8	3,504,653
70	Pengelola Kepegawaian	6	1,453,920
71	Pengadministrasian Keuangan	5	1,516,224
72	Pengadministrasian Umum	5	1,439,873
73	Pengelola Retribusi Terminal	6	1,228,074
74	Pengelola Terminal	6	1,228,074

75	Kepala UPTD Pengelola Parkir	8	4,044,287
76	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Parkir	8	3,504,653
77	Pengelola Kepegawaian	6	1,453,920
78	Pengadministrasi Keuangan	5	1,516,224
79	Pengadministrasi Umum	5	1,439,873
80	Pengelola Perparkiran	6	1,297,230
81	Penagih Retribusi	5	1,228,074
82	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	9	4,057,935
83	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	8	3,504,653
84	Pengelola Kepegawaian	6	1,453,920
85	Pengadministrasi Keuangan	5	1,516,224
86	Pengadministrasi Umum	5	1,439,873
87	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1,435,542
88	Arsiparis	6	2,032,418
89	Penguji Kendaraan Bermotor	5	2,032,418
90	Perencana	8	2,032,418
91	Pranata Hubungan Masyarakat	9	2,032,418
92	Pranata Komputer	6	2,032,418
93	Pranata Siaran	8	2,032,418
94	Sandiman	8	2,032,418

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	31,576,566
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	18,494,918
3	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,336,601
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	3,472,850
5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	7,304,282
7	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	3,472,850
8	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	3,014,157
9	Pengelola Kepegawaian	6	3,014,157
10	Pengadministrasi Umum	5	3,014,157
11	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	3,014,157
12	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	3,014,157
13	Pengelola Barang Milik Negara	6	4,067,465
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	7,304,282
15	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	3,014,157
16	Bendahara	7	4,067,465
17	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	11	11,310,823
18	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,336,601
19	Analisis Perencanaan	7	3,472,850
20	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
21	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
22	Analisis Perencanaan	7	3,472,850
23	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
24	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
25	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11	11,310,823
26	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,336,601
27	Analisis Perencanaan	7	3,472,850
28	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
29	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
30	Analisis Perencanaan	7	3,472,850
31	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
32	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
33	Kepala Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah	11	11,310,823
34	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,336,601
35	Analisis Perencanaan	7	3,472,850

36	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
37	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
38	Analisis Perencanaan	7	3,472,850
39	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
40	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
41	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	11	11,310,823
42	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	7,336,601
43	Analisis Perencanaan Anggaran	7	3,472,850
44	Analisis Program Pembangunan	7	3,472,850
45	Analisis Data dan Informasi	7	3,472,850
46	Pengelola Bahan Perencanaan	6	3,014,157
47	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	3,472,850
48	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	3,014,157
49	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	3,014,157
50	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	11	11,310,823
51	Peneliti Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	7,304,282
52	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	3,472,850
53	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	7	3,014,157
54	Pengelola Penelitian	6	3,014,157
55	Analisis Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	7	3,472,850
56	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	7	3,014,157
57	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	3,014,157
58	Kepala Sub Bidang Statistik	9	7,304,282
59	Analisis Statistik	7	3,472,850
60	Pengelola Data Statistik	6	3,014,157
61	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	10	3,472,850
62	Perencana Ahli Muda	9	4,281,550
63	Perencana Ahli Pertama	8	3,819,471
64	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	8	3,472,850
65	Arsiparis	6	3,472,850
66	Peneliti	8	3,472,850
67	Perekayasa	8	3,472,850
68	Pranata Komputer	6	3,472,850
69	Perencana	10	-

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	29,643,411
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	16,432,243
3	Arsiparis	6	3,322,850
4	Pranata Komputer	6	3,027,388
5	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	6,504,746
6	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	3,322,850
7	Pengelola Bahan Perencanaan	6	2,975,992
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	6,504,746
9	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	3,322,850
10	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	2,975,992
11	Pengelola Kepegawaian	6	2,975,992
12	Pengadministrasi Umum	5	2,629,849
13	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	2,975,992
14	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	2,975,992
15	Pengelola Barang Milik Negara	6	3,987,391
16	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	6,504,746
17	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	2,975,992
18	Bendahara	7	3,987,391
19	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	11	10,760,200
20	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	6,504,746
21	Pranata SDM Aparatur	7	3,027,388
22	Pranata Komputer	6	3,027,388
23	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	7	3,322,850
24	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	2,975,992
25	Pengelola Kepegawaian	6	2,975,992
26	Analisis Data dan Informasi	7	3,322,850
27	Analisis Sistem Informasi	7	3,322,850
28	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	2,975,992
29	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	6	2,975,992
30	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	11	10,760,200
31	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	6,504,746
32	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	3,322,850
33	Pranata SDM Aparatur	7	3,027,388
34	Penyusun Rencana Mutasi	6	2,975,992
35	Pengelola Kepegawaian	6	2,975,992

36	Analisis Pengembangan Karir	7	3,322,850
37	Pengelola Pengembangan Karir	6	2,975,992
38	Penyusun Rencana Promosi	7	2,975,992
39	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	5	2,975,992
40	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	11	10,760,200
41	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	9	6,504,746
42	Widyaiswara	12	7,062,761
43	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	3,322,850
44	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	8	3,322,850
45	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	6	2,975,992
46	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	2,975,992
47	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur	6	2,975,992
48	Pengadministrasi Pelatihan	5	2,975,992
49	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	11	10,760,200
50	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	6,504,746
51	Pranata SDM Aparatur	7	3,027,388
52	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	3,322,850
53	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	3,322,850
54	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	2,975,992
55	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	3,322,850
56	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	7	3,322,850
57	Pengelola Disiplin Pegawai	6	2,975,992

	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14	31,752,307
2	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	12	18,557,979
3	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	9,459,923
4	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	5,547,431
5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	5,066,456
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	9,459,894
7	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	5,547,431
8	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	4,240,902
9	Pengelola Kepegawaian	6	5,066,456
10	Pengadministrasi Umum	5	5,066,201
11	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	5,066,409
12	<i>Pranata Kearsipan</i>	6	3,498,495
13	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	5,066,456
14	Pengelola Barang Milik Negara	6	6,106,463
15	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	9,459,894
16	<i>Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara</i>	6	5,066,456
17	Bendahara	7	6,650,643
18	Kepala Bidang Anggaran	11	12,578,415
19	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja I	9	9,459,894
20	Analisis Perencanaan Anggaran	7	5,547,431
21	Pengelola Anggaran	6	5,066,456
22	Verifikator Anggaran	7	5,077,912
23	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran II	9	9,459,894
24	Analisis Perencanaan Anggaran	7	5,547,431
25	Pengelola Anggaran	6	5,066,456
26	Verifikator Anggaran	7	5,077,912
27	Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	9,459,923
28	Analisis Perencanaan Anggaran	7	5,547,431
29	Analisis Pembiayaan Daerah	7	5,547,431
30	Pengelola Anggaran	6	5,066,456
31	Pengolah Data Kebijakan Pembiayaan Daerah	6	5,066,456
32	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	12,578,415
33	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I	8	9,458,412
34	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	6	5,066,456
35	Pengelola Data Pencairan dana	6	5,066,456
36	Pengelola Data	6	5,066,456

37	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II	8	9,458,412
38	Pengelola Gaji	6	5,066,456
39	Pengelola Data Pencairan dana	6	5,066,456
40	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	9,459,923
41	Pengolah Data Laporan Kas	6	5,066,456
42	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	11	12,578,415
43	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi	9	9,459,894
44	Analisis Keuangan	7	5,547,431
45	Pengolah Data Sistem Akuntansi	6	3,498,495
46	Kepala Sub Bidang Analisis Data dan Pelaporan	9	9,459,894
47	Analisis Laporan Keuangan	7	5,547,431
48	Pengelola Laporan Keuangan	6	5,066,456
49	Kepala Bidang Aset Daerah	11	12,578,415
50	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	9,459,923
51	Analisis Klasifikasi Barang	7	5,547,431
52	Analisis Standard Harga	7	5,547,431
53	Analisis Tuntutan Ganti Rugi	7	5,547,431
54	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	7	5,066,409
55	Pengelola Data	6	5,066,456
56	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan	9	9,459,894
57	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	7	5,066,409
58	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	5,066,456
59	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah	9	9,459,894
60	Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah	7	5,547,431
61	Analisis Aset Daerah	7	5,547,431
62	Pengolah Data Laporan Realisasi Neraca	6	5,066,456
63	Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah	11	12,578,415
64	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan informasi Pajak Daerah	8	9,458,412
65	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	5,066,456
66	Pengelola Pajak Daerah	6	5,066,456
67	Pengelola data dan Informasi Perpajakan	6	5,066,456
68	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah	9	9,459,894
69	Analisis Pajak Daerah	7	5,547,431
70	Pengelola Data Dokumen dan Perpajakan	6	5,066,456
71	Verifikator Pajak	7	5,077,912
72	Pengolah Data Kebijakan Pajak	6	5,066,456

73	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	9,459,923
74	Analisis Pemeriksaan Pajak	7	5,547,431
75	Penelaah Keberatan Tingkat Satu	7	5,547,431
76	Pengelola Data Penagihan Pajak	6	5,066,456
77	Pengolah Data Pemeriksaan pajak	6	5,066,456
78	Juru sita	3	5,066,026
79	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	11	12,578,415
80	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah	9	9,459,894
81	Analisis Pendapatan Daerah	7	5,547,431
82	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	6	5,066,456
83	Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	6	5,066,456
84	Pengelola Pendapatan	6	5,066,456
85	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah	9	9,459,894
86	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	5,547,431
87	Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	6	5,066,456
88	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	9,459,923
89	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	5,547,431
90	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6	5,066,456
91	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	8	5,544,150
92	Arsiparis	6	5,544,160
93	Penata Laksana Barang	6	5,544,160
94	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	8	5,544,150
95	Perencana	10	5,544,150
96	Pranata Komputer	6	5,544,160

	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	23,653,817
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	14,569,737
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,750,122
4	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,076,601
5	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,817,026
6	Pengelola Kepegawaian	6	1,817,026
7	Pengadministrasi Umum	5	1,817,026
8	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	1,817,026
9	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,817,026
10	Pengelola Barang Milik Negara	6	2,884,741
11	Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	9	3,750,122
12	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,076,601
13	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,817,026
14	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,817,026
15	Bendahara	7	2,884,741
16	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	11	7,410,539
17	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
18	Analisis Wawasan Kebangsaan	7	2,076,601
19	Analisis Ideologi	7	2,076,601
20	Penyuluh Pertahanan Negara	7	1,817,026
21	Analisis Ketahanan Sosial	7	2,076,601
22	Analisis Forum Kerukunan Umat	7	2,076,601
23	Analisis Ketahanan Budaya	7	2,076,601
24	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	11	7,410,539
25	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
26	Analisis Politik Dalam negeri	7	2,076,601
27	Analisis Partai Politik	7	2,076,601
28	Analisis Politik Hukum dan Keamanan	7	2,076,601
29	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
30	Analisis Organisasi Masyarakat	7	2,076,601
31	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	6	2,076,601
32	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat	6	1,817,026
33	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	11	7,410,539
34	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,750,572
35	Analisis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	7	2,076,601
36	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	7	2,076,601
37	Analisis Dampak Sosial	7	2,076,601
38	Pengolah Data Intelijen	6	1,817,026
39	Penyuluh Keamanan Masyarakat	7	1,817,026

	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	23,653,817
2	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	14,569,737
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,910,373
4	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	2,243,023
5	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,930,987
6	Pengelola Kepegawaian	6	1,930,987
7	Pengadministrasi Umum	5	1,818,787
8	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	2,232,566
9	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	1,930,987
10	Pengelola Barang Milik Negara	6	2,930,557
11	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3,910,373
12	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	1,930,987
13	Bendahara	7	2,980,241
14	Perencana ahli muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,918,508
15	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2,243,023
16	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,930,987
17	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	11	7,410,539
18	Analisis Kebencanaan ahli muda (Penyetaraan Jabatan)	10	3,918,508
19	Analisis Mitigasi Bencana	7	2,243,023
20	Penyuluh Bencana	7	2,232,566
21	Pranata Bencana	6	1,930,987
22	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	1,930,987
23	Analisis Kesiapsiagaan	7	2,243,023
24	Pengelola Sistem Peringatan Dini	6	1,930,987
25	Penyuluh Bencana	7	2,232,566
26	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	11	7,410,539
27	Penata Penanggulangan Bencana ahli muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,910,373
28	Analisis Bencana	7	2,243,023
29	Penyusun Program Perencanaan Operasi	7	2,232,566
30	Pranata Bencana	6	1,930,987
31	Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Bencana	6	1,930,987
32	Analisis Kemitraan	7	2,243,023
33	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	2,232,566
34	Pengelola Logistik	6	1,930,987
35	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11	7,410,539
36	Penata Penanggulangan Bencana ahli muda (Penyetaraan Jabatan)	9	3,910,373

37	Konselor	7	2,232,566
38	Pranata Bencana	6	1,930,987
39	Analisis Kerusakan Fisik dan Bangunan	7	2,243,023
40	Pengelola Data Dampak Bencana	6	1,930,987
41	Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	8	4,151,027
42	Kepala Subag Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran	8	4,032,427
43	Pengelola Kepegawaian	6	1,930,987
44	Pengadministrasi Umum	5	1,818,787
45	Investigator	7	2,232,566
46	Pranata Pemadam Kebakaran	6	2,226,315

	Kecamatan		
1	Camat	12	11,981,469
2	Sekretaris Kecamatan	11	7,157,020
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3,510,583
4	Pengelola Kepegawaian	6	1,135,875
5	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	1,135,875
6	Pranata Kearsipan	6	1,135,875
7	Pengelola Barang Milik Negara	6	2,371,752
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	3,511,958
9	Pengelola Bahan Perencanaan	6	1,135,875
10	Pengadministrasi Keuangan	5	1,125,374
11	Bendahara	7	2,614,246
12	Kepala Seksi Pemerintahan	8	3,510,583
13	Pengadministrasi Pemerintahan	5	1,125,374
14	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	1,135,875
15	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan	8	3,510,583
16	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	1,135,875
17	Pengelola PBB P2 dan BPHTB	6	1,135,875
18	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	3,510,583
19	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	1,135,875
20	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	3,510,583
21	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	1,135,875


 BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR :
 TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

REKAPITULASI PEMBAYARAN TPP

PERANGKAT DAERAH :
 BULAN :

NO	NAMA	NIP	TPP YANG DITERIMA (total)	BESARAN TPP DARI DISIPLIN (30%)	PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN		BESARAN TPP YANG DITERIMA DARI DISIPLIN (5 - 7)	BESARAN TPP DARI KINERJA (70%)	PENGURANGAN KOMPONEN KINERJA		BESARAN TPP YANG DITERIMA DARI KINERJA (9 - 11)	TOTAL BESARAN TPP YANG DITERIMA	PARAF
					PER PERSENTASE PENGURANGAN (%)	BESARAN PENGURANGAN (5 x 6)			PER PERSENTASE PENGURANGAN (%)	BESARAN PENGURANGAN (10 x 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Jumlah			Rp.	Rp.		Rp.	Rp.	Rp.		Rp.	Rp.		

Mengetahui:
 Kepala Perangkat Daerah,

NAMA
 Pangkat
 NIP.

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR :
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

KOP BKPSDM

REKOMENDASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR.....

- a. Dasar :
- b. Menimbang :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
memberikan rekomendasi kepada :

- a. Jabatan :
- b. Perangkat Daerah :

Untuk :
.....
.....

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....,20...

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

NAMA
Pangkat
NIP.



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Catatan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

- 1 Realisasi Belanja Modal
- 2 Reklasifikasi Dari Aset Lain-Lain
- 3 Mutasi Tambah
- 4 Mutasi Kurang
- 5 Usulan Reklas Ke Aset Lain-Lain
- 6 Usulan Penghapusan

Laporan tersebut telah sesuai dengan data pada Bidang Aset BPKPD Kab. Tasikmalaya
Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dijadikan sebagaimana mestinya

Kasubag Umum dan
Kepegawaian
UPB : _____

NAMA
NIP

Mengetahui
Kepala SKPD

NAMA
NIP

Pengurus Barang
UPB: _____

NAMA
NIP

Mengetahui
Kepala Bidang Aset Daerah :

NAMA
NIP


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO